

Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 26, No. 1, 2021

p-ISSN: 0853-9316 e-ISSN: 2614-3712

- **PENGEMBANGAN SISTEM PANGAN MELALUI PENGUATAN BADAN PANGAN NASIONAL**
oleh : Lukman Adam dan Achmad Suryana
- **PATTERNS OF CABINET FORMATION IN INDONESIA: THE CASE OF YUDHOYONO AND WIDODO'S CABINETS**
oleh : Aryo Wasisto
- **KEMISKINAN DI INDONESIA PADA SAAT PANDEMI COVID-19**
oleh : Ari Mulianta Ginting
- **PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2020: EVALUASI PELAKSANAAN DAN KEBIJAKAN**
oleh : Aryojati Ardipandanto
- **PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19: TELAAH PUSTAKA**
oleh : Edmira Rivani dan Eddo Rio
- **EFEKTIVITAS PENGATURAN PENERTIBAN TANAH TERLANTAR**
oleh : Harris Y. P. Sibuea



**Diterbitkan oleh
Pusat Penelitian Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

Kajian

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan

Vol. 26, No. 1, 2021

p-ISSN: 0853-9316 e-ISSN: 2614-3712

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	i
● PENGEMBANGAN SISTEM PANGAN MELALUI PENGUATAN BADAN PANGAN NASIONAL <i>oleh : Lukman Adam dan Achmad Suryana</i>	1 - 19
● PATTERNS OF CABINET FORMATION IN INDONESIA: THE CASE OF YUDHOYONO AND WIDODO'S CABINETS <i>oleh : Aryo Wasisto</i>	21 - 34
● KEMISKINAN DI INDONESIA PADA SAAT PANDEMI COVID-19 <i>oleh : Ari Mulianta Ginting</i>	35 - 49
● PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2020: EVALUASI PELAKSANAAN DAN KEBIJAKAN <i>oleh : Aryojati Ardipandanto</i>	51 - 74
● PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19: TELAAH PUSTAKA <i>oleh : Edmira Rivani dan Eddo Rio</i>	75 - 89
● EFEKTIVITAS PENGATURAN PENERTIBAN TANAH TERLANTAR <i>oleh : Harris Y. P. Sibuea</i>	91 - 102

PENGANTAR REDAKSI

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI kembali menghadirkan Majalah Kajian untuk para pembaca dalam Kajian Vol 26. No. 1 Tahun 2021. Terdapat enam tulisan yang telah terseleksi dari sejumlah tulisan yang disumbangkan baik dari penulis eksternal maupun internal Pusat Penelitian. Tulisan pertama berjudul “Pengembangan Sistem Pangan melalui Penguatan Badan Pangan Nasional”, yang ditulis oleh Lukman Adam dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan Achmad Suryana dari Forum Komunikasi Profesor Riset, Pembentukan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) merupakan pelaksanaan salah satu amanat yang tertulis dalam UU Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pangan, yaitu perlunya dibentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan. Harapan besar dialamatkan ke BAPANAS untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan dan gizi secara berkelanjutan. Terdapat enam aspek internal organisasi yang perlu mendapat perhatian dalam penguatan BAPANAS sebagai organisasi publik yang berorientasi inovasi dan pelayanan, yaitu kepemimpinan, anggaran, sumber daya manusia, tata pemerintahan, manajemen risiko, dan prediksi teknologi mendatang. Selain itu, penanganan sistem pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan termasuk pengawasan keamanan pangan segar dan olahan, perlu dilaksanakan secara harmonis dan sinergis oleh kementerian/lembaga dengan dikoordinasikan oleh BAPANAS.

Artikel kedua adalah tentang “*Patterns of Cabinet Formation in Indonesia: the Case of Yudhoyono and Widodo’s Cabinets*”, yang ditulis oleh Aryo Wasisto dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Kabinet koalisi memiliki beberapa masalah, terutama kesulitan dalam pengaturan ego sektoral para menteri yang mewakili partai politik. Hal ini menunjukkan kepentingan-kepentingan rasional yang kemudian populer disebut oligarki. Problem ini mempengaruhi kinerja perekonomian negara, di mana fokus reorganisasi telah menyita banyak waktu presiden. Ada kesamaan antara rezim Yudhoyono dan Joko Widodo; kabinet diisi oleh politisi, pebisnis, politisi, pebisnis non-politik, dan pakar. Menariknya, kedua pemerintah memaksimalkan posisi menteri dari latar belakang pengusaha non-politik pada periode ke-2 sebagai ikatan formal kinerja timbal balik selama kampanye. Jokowi periode ke-2 menghasilkan fenomena bergabungnya rival Prabowo ke dalam pemerintahan yang berbarengan dengan. Pada masa mendatang, pola-pola koalisi ini membutuhkan konsekuensi pengawasan objektif dari lembaga perwakilan rakyat yang untuk memonitor para menteri untuk tidak terjebak dalam ego sektoral mereka.

Tulisan ketiga membahas isu pandemi Covid-19 dengan judul “Kemiskinan di Indonesia Pada Saat Pandemi Covid-19”, yang ditulis oleh Ari Mulianta Ginting dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Peningkatan kasus Covid-19 tersebut memberikan dampak kepada seluruh aspek kehidupan khususnya perekonomian. Peningkatan pandemi Covid-19 berdampak terhadap peningkatan kemiskinan di hampir seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Pandemi Covid-19 berdampak terhadap *shock* meningkatkan kemiskinan di Indonesia. Fluktuasi kemiskinan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh Covid-19. Berdasarkan hal tersebut maka sudah waktunya pemerintah baik pusat maupun daerah untuk bersama-sama mengatasi persoalan utama yaitu pandemi Covid-19 untuk mencegah semakin meningkatnya kemiskinan di Indonesia. Namun pada saat yang bersamaan dibutuhkan keberpihakan kebijakan pemerintah dalam bentuk bantuan sosial yang harus segera disalurkan kepada masyarakat untuk mencegah keparahan kemiskinan di Indonesia.

Tulisan keempat ditulis oleh Aryojati Ardipandanto dengan judul “Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020: Evaluasi Pelaksanaan dan Kebijakan”. Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak selanjutnya adalah pada 2024. Agar kebijakan politik bagi pilkada yang akan datang dapat demokratis, maka diperlukan pembelajaran dari evaluasi pelaksanaan pilkada serentak 2020. Masalah yang terjadi dalam pilkada antara lain terkait adanya politik dinasti, *money politics*, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), politik identitas terkait Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA), regulasi birokratis pencalonan yang mengakibatkan adanya fenomena “kotak kosong” dan profesionalisme penyelenggara pilkada. Maka dari itu, kebijakan politik bagi revisi undang-undang pemilihan hendaknya mengakomodasi muatan-muatan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut agar pilkada dapat lebih terwujud secara demokratis.

Tulisan kelima berjudul “Penggunaan Uang Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19: Telaah Pustaka” yang ditulis oleh Edmira Rivani dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan Eddi Rio dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pandemi Covid-19 telah mengubah perilaku masyarakat dalam bertransaksi secara non-tunai agar mengurangi resiko terinfeksi virus corona. Hal ini ditandai dengan meningkatnya nilai transaksi *e-money* mencapai 59% selama periode Januari-Juli 2020. Perubahan perilaku konsumen di masa pandemi, dari yang melakukan pembelian secara fisik menjadi *online*, menyebabkan penjualan *online* semakin me-

ningkat. Kemudahan dan keamanan yang ada pada transaksi menggunakan *e-money* dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi masyarakat dalam memilih *e-money* sebagai suatu alat pembayaran. Beberapa kendala meliputi kegiatan transaksi nontunai, salah satunya faktor sosial dan budaya serta faktor keterseediaan infrastruktur. Dalam hal ini antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat masing-masing harus turut andil dalam mensosialisasikan *cashless society*. Pemerintah dengan terus melakukan perkembangan sistem maupun aturan sebagai payung hukum dari uang elektronik itu sendiri, selain itu menyediakan sarana penunjang yang merata di seluruh daerah dan tidak terfokus di kota-kota besar saja

Tulisan yang terakhir berjudul “Efektifitas Pengaturan Penertiban Tanah Terlantar”, yang ditulis oleh Harris Y. P. Sibuea dari Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Keberadaan tanah yang ditelantarkan oleh pemilik tanah masih sangat masif sampai sekarang. Pengaturan tanah terlantar tersebut menunjukkan adanya ketidakefektifan pada faktor hukum (undang-undang) dan faktor pelaksana penertiban tanah terlantar. Tahapan identifikasi dan penelitian merupakan tahapan yang paling sering terjadi kesalahan bahkan tidak dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk melaksanakan penertiban tanah terlantar. Oleh karena itu, semua tahapan penertiban tanah terlantar berdasar UUPA, PP No 11 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 harus benar-benar dilaksanakan secara hati-hati agar tidak ada lagi tanah terlantar.

Demikianlah keenam karya tulis ilmiah yang kami tampilkan pada jurnal Kajian Vol 26, No. 1 Tahun 2021. Kami harapkan tulisan-tulisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Selanjutnya kami tentu mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca untuk penyempurnaan jurnal Kajian di edisi berikutnya. Redaksi juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, M.Si, Tommy Hendra Purwaka, S.H., LL.M, Ph.D, Dr. Y.B. Suhartoko, SE. ME, Dr. phil. Yandry Kurniawan, dan Prof. Dr. Firman Noor, MA, sebagai mitra bestari atas koreksi dan masukannya terhadap semua tulisan dalam jurnal Kajian edisi kali ini.

Jakarta, Juni 2021

Redaksi

LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Lukman Adam (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) dan Achmad Suryana (Forum Komunikasi Profesor Riset, Kementerian Pertanian)

PENGEMBANGAN SISTEM PANGAN MELALUI PENGUATAN BADAN PANGAN NASIONAL

Kajian Vol. 26, No. 1, Tahun 2021, hlm.1-19

Pembentukan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) merupakan pelaksanaan salah satu amanat yang tertulis dalam UU Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pangan, yaitu perlunya dibentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan. Harapan besar dialamatkan ke BAPANAS untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan dan gizi secara berkelanjutan. Kajian ini bertujuan untuk mendiskusikan pengembangan sistem pangan nasional berkelanjutan melalui penguatan BAPANAS, khususnya dalam penguatan internal organisasi, peran organisasi publik dalam pengembangan sistem pangan berkelanjutan, dan pembelajaran pengelolaan sistem pangan di China. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan konsep inovasi sektor publik (public sector innovation). Terdapat enam aspek internal organisasi yang perlu mendapat perhatian dalam penguatan BAPANAS sebagai organisasi publik yang berorientasi inovasi dan pelayanan, yaitu kepemimpinan, anggaran, sumber daya manusia, tata pemerintahan, manajemen risiko, dan prediksi teknologi mendatang. Selain itu, penanganan sistem pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan termasuk pengawasan keamanan pangan segar dan olahan, perlu dilaksanakan secara harmonis dan sinergis oleh kementerian/lembaga dengan dikoordinasikan oleh BAPANAS.

Kata Kunci: kelembagaan pangan nasional; inovasi sektor publik; ketahanan pangan dan gizi; cadangan pangan pemerintah.

Aryo Wasisto (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

POLA PEMBENTUKAN KABINET DI INDONESIA: KASUS KABINET ERA SBY DAN JOKOWI

Kajian Vol. 26, No. 1, Tahun 2021, hlm. 21 - 34

Artikel ini membahas tentang pembentukan kabinet di Indonesia yang karakternya dipengaruhi langsung oleh sistem presidensial multipartai dimana partai presidensial selalu menjadi minoritas. Kabinet koalisi memiliki beberapa masalah, terutama kesulitan dalam pengaturan ego sektoral para menteri yang mewakili partai politik. Hal ini menunjukkan kepentingan-kepentingan rasional yang kemudian populer disebut oligarki. Problem ini mempengaruhi kinerja perekonomian negara, dimana fokus reorganisasi telah menyita banyak waktu presiden. Dengan menggunakan metode kualitatif, khususnya analisis dokumen, artikel ini menemukan bahwa alokasi portofolio menteri kabinet di Indonesia mempengaruhi kinerja dan soliditas koalisi. Ada kesamaan antara rezim Yudhoyono dan Joko Widodo; kabinet diisi oleh politisi, pebisnis, politisi, pebisnis non-politik, dan pakar. Menariknya, kedua pemerintah memaksimalkan posisi menteri dari latar belakang pengusaha non-politik pada periode ke-2 sebagai ikatan formal kinerja timbal balik selama kampanye. Jokowi periode ke-2 menghasilkan fenomena bergabungnya rival Prabowo ke dalam pemerintahan yang berbarengan dengan. Pada masa mendatang, pola-pola koalisi ini membutuhkan konsekuensi pengawasan objektif dari lembaga perwakilan rakyat yang untuk memonitor para menteri untuk tidak terjebak dalam ego sektoral mereka.

Kata Kunci: formasi cabinet; koalisi oligarki; alokasi menteri.

Ari Mulianta Ginting (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

KEMISKINAN DI INDONESIA PADA SAAT PANDEMI COVID-19

Kajian Vol. 26, No. 1, Tahun 2021, hlm. 35-49

Pandemi Covid-19 mengalami tren peningkatan jumlah kasus Covid-19 di dunia. Peningkatan kasus tersebut juga dialami oleh Indonesia. Peningkatan kasus Covid-19 tersebut memberikan dampak kepada seluruh aspek kehidupan khususnya perekonomian. Peningkatan pandemi Covid-19 berdampak terhadap peningkatan kemiskinan di hampir seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia. Penelitian ini dengan menggunakan analisa kuantitatif dengan VAR dengan menggunakan data bulanan. Penelitian ini mencoba melakukan analisa terkait dampak pandemi Covid-19 terhadap kemiskinan di Indonesia. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pandemi Covid-19 berdampak terhadap shock meningkatkan kemiskinan di Indonesia. Lebih lanjut berdasarkan variance decomposition ditemukan bahwa fluktuasi deferen variabel kemiskinan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh variabel Covid-19. Berdasarkan hal tersebut maka sudah waktunya pemerintah baik pusat maupun daerah untuk bersama-sama mengatasi persoalan utama yaitu pandemi Covid-19 untuk mencegah semakin meningkatnya kemiskinan di Indonesia. Namun pada saat yang bersamaan dibutuhkan keberpihakan kebijakan pemerintah dalam bentuk bantuan sosial yang harus segera disalurkan kepada masyarakat untuk mencegah keparahan kemiskinan di Indonesia.

Kata kunci: pandemi Covid-19; kemiskinan; vector auto regression.

Aryojati Ardipandanto (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2020: EVALUASI PELAKSANAAN DAN KEBIJAKAN

Kajian Vol. 26, No. 1, Tahun 2021, hlm. 51-74

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyepakati pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak selanjutnya adalah pada 2024. Agar kebijakan politik bagi pilkada yang akan datang dapat demokratis, maka diperlukan pembelajaran dari evaluasi pelaksanaan pilkada serentak 2020. Tulisan ini membahas bagaimana kelemahan-kelemahan yang masih ada pada pilkada serentak 2020. Kajian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi DPR RI dan pemerintah agar kesalahan-kesalahan yang ada pada pilkada serentak 2020 tidak terulang lagi pada pilkada selanjutnya. Penelitian dalam kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka. Dari kajian ini ditemukan bahwa masalah yang terjadi antara lain terkait adanya politik dinasti, money politics, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), politik identitas terkait Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), regulasi birokratis pencalonan yang mengakibatkan adanya fenomena “kotak kosong” dan profesionalisme penyelenggara pilkada. Maka dari itu, kebijakan politik bagi revisi undang-undang kepemiluan hendaknya mengakomodasi muatan-muatan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut agar pilkada dapat lebih terwujud secara demokratis.

Kata kunci: pilkada; pilkada serentak 2020; pemilu; kebijakan politik.

Edmira Rivani (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) dan Eddo Rio (Fakultas Hukum Universitas Airlangga)

PENGUNAAN UANG ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19: TELAH PUSTAKA

Kajian Vol. 26, No. 1, Tahun 2021, hlm. 75-89

Covid 19 merupakan penyakit baru yang memiliki tingkat penularan relatif cepat dan tingkat kematian yang tinggi. Pandemi ini telah mengubah perilaku masyarakat dalam bertransaksi secara nontunai agar mengurangi resiko terinfeksi virus corona. Perubahan tersebut menarik untuk dikaji, tujuan penulisan ini adalah agar dapat diketahui bagaimana perkembangan e-money di Indonesia, penggunaan uang elektronik sebagai mode baru konsumtif masyarakat kelas menengah, penggunaan uang elektronik pada masa pandemi covid-19 dengan melihat model the adaptive shopper serta tantangan yang akan dihadapi ke depannya. Cashless society sudah disosialisasikan kepada masyarakat sebelum pandemi covid-19 muncul. Pada tanggal 14 Agustus 2014, dicanangkan Gerakan Nasional Nontunai (GNNT) yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku bisnis untuk menggunakan pembayaran nontunai dalam transaksi keuangan. Cashless society semakin marak pada masa pandemi ini, ditandai dengan meningkatnya nilai transaksi e-money mencapai 59% selama periode Januari-Juli 2020. Perubahan perilaku konsumen di masa pandemi, dari yang melakukan pembelian secara fisik menjadi online, menyebabkan penjualan online semakin meningkat. Tentu saja hal tersebut berdampak pula pada penggunaan transaksi, yang sebelumnya menggunakan uang tunai, kini lazim memanfaatkan e-money. Kemudahan dan keamanan yang ada pada transaksi menggunakan e-money dapat menjadi bahan pertimbangan penting bagi masyarakat dalam memilih e-money sebagai suatu alat pembayaran. Beberapa kendala meliputi kegiatan transaksi nontunai, salah satunya faktor sosial dan budaya serta faktor ketersediaan infrastruktur. Dalam hal ini antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat masing-masing harus turut andil dalam mensosialisasikan cashless society. Pemerintah dengan terus melakukan perkembangan sistem maupun aturan sebagai payung hukum dari uang elektronik itu sendiri, selian itu menyediakan sarana penunjang yang merata di seluruh daerah dan tidak terfokus di kota-kota besar saja.

Kata Kunci: transaksi elektronik; uang elektronik; cashless society; Covid-19.

Harris Y. P. Sibuea (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

EFEKTIFITAS PENGATURAN PENERTIBAN TANAH TERLANTAR

Kajian Vol. 26, No. 1, Tahun 2021, hlm. 91-102

Keberadaan tanah yang ditelantarkan oleh pemilik tanah masih sangat masif sampai sekarang. Tanah merupakan benda berharga untuk dimiliki. Keefektifan hukum sangat diperlukan dalam penertiban tanah terlantar. Berdasarkan kondisi tersebut, fokus permasalahan dari tulisan ini adalah bagaimana efektifitas pengaturan penertiban tanah terlantar. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif yang dianalisa menggunakan teori efektifitas hukum. Pengaturan tanah terlantar tersebut menunjukkan adanya ketidakefektifan pada faktor hukum (undang-undang) dan faktor pelaksana penertiban tanah terlantar. Tahapan identifikasi dan penelitian merupakan tahapan yang paling sering terjadi kesalahan bahkan tidak dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk melaksanakan penertiban tanah terlantar. Oleh karena itu, semua tahapan penertiban tanah terlantar berdasar UUPA, PP No 11 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4 Tahun 2010 harus benar-benar dilaksanakan secara hati-hati agar tidak ada lagi tanah terlantar.

Kata Kunci: tanah terlantar; efektifitas hukum; penertiban tanah terlantar; pelaksana penertiban tanah terlantar.

LEMBAR ABSTRAK

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

Lukman Adam (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) dan Achmad Suryana (Forum Komunikasi Profesor Riset, Kementerian Pertanian)

DEVELOPMENT OF FOOD SYSTEMS THROUGH STRENGTHENING NATIONAL FOOD AGENCY

Kajian Vol. 26, No. 1, Tahun 2021, pp. 1-19

The National Food Agency (NFA) establishment implements one of the mandates written in Law Number 18/2012 about Food, namely the need to form a government institution responsible for food systems development. High expectation is addressed to NFA to achieve sustainable food and nutrition security. This study aims to discuss the development of a sustainable national food system through strengthening NFA, mainly on strengthening internal organizations, the role of public organizations in developing a sustainable food system, and lessons learn on food system management in China. This research method uses a qualitative approach with public sector innovation and the food system. There are six internal aspects of the organization that need attention in strengthening NFA as innovation and service-oriented public organization: leadership, budget, human resources, governance, risk management, and prediction of future technology. In addition, the development of food systems, namely food availability, affordability, and utilization, including the supervision of the food safety, fresh and processed, needs to be carried out harmoniously and synergistically among government institutions and other stakeholders coordinated by NFA.

Keywords: national food institution; public sector innovation; food and nutrition security; government food reserve

Aryo Wasisto (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

PATTERNS OF CABINET FORMATION IN INDONESIA: THE CASE OF YUDHOYONO AND WIDODO'S CABINETS

Kajian Vol. 26, No. 1, Tahun 2021, pp. 21-34

This article discusses cabinet formation in Indonesia, in which the character is directly influenced by the multiparty presidential system in which the presidential party is always in the minority. The coalition cabinet has several problems, primarily regulating the sectoral egos of the ministers who are representatives of political parties. This problem shows rational interests, which are popularly referred to as extractive oligarchy. It affects the performance of the country's economy, where the focus of reorganization has immensely drawn attention. This article uses a qualitative method, especially the document analysis; suggests that the portfolio allocation of cabinet ministers in Indonesia affects the performance and solidity of the coalition. There are similarities between the Yudhoyono and Widodo administrations; the cabinet is filled with politicians, business people, non-political business people, and experts. Interestingly, both governments maximized the non-political entrepreneur in the second period as a formal tie of reciprocal performance during the campaign. In the future, these coalition patterns require objective supervision from the people's representative institutions to scrutinize ministers so as not to get caught up in their sectoral egos.

Keywords: cabinet formation; coalition oligarchy; minister allocation.

Ari Mulianta Ginting (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

POVERTY IN INDONESIA IN THE COVID-19 PANDEMIC

Kajian Vol. 26, No. 1, Tahun 2021, pp. 35-49

The covid-19 pandemic has experienced an increasing trend in cases globally. The increase of the Covid-19 pandemic also happened in Indonesia, which impacts all aspects of life, especially the economy. The increase in the Covid-19 pandemic impacts increasing poverty in almost all parts of the world, including Indonesia. This study uses a quantitative analysis with VAR analysis using monthly data. This study tries to analyze the impact of the Covid-19 pandemic on poverty in Indonesia. This study found that the Covid-19 pandemic impacted Indonesia's shock of increasing poverty. Furthermore, based on variance decomposition, it was found that the Covid-19 variable heavily influenced the different fluctuations in the poverty variable in Indonesia. Based on this, it is time for the Government, both central and regional, to jointly overcome the main problem, namely the Covid-19 pandemic, to prevent the increasing poverty in Indonesia. However, at the same time, government policies are needed in social assistance, which must be immediately distributed to the community to prevent poverty in Indonesia.

Keywords: pandemic Covid-19; poverty; vector auto regression

Aryojati Ardipandanto (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

SIMULTANEOUS REGIONAL ELECTIONS 2020: EVALUATION OF IMPLEMENTATION AND POLICIES

Kajian Vol. 26, No. 1, Tahun 2021, pp. 51-74

Commission II DPR RI has agreed that the next Simultaneous Regional Head Election (Pilkada) will be in 2024. For the political policy for the upcoming Pilkada to be democratic, learning is needed from evaluating the implementation of Simultaneous Pilkada 2020. This paper discusses how to avoid the weaknesses in Simultaneous Pilkada 2020. This study aims to provide recommendations for the DPR RI and the Government on how the mistakes that existed in the 2020 Pilkada Simultaneously would not be repeated in the next Pilkada. The research in this study used the qualitative method by collecting data through literature studies. This study found that the remaining problems were dynastic politics, money politics, the neutrality of ASN, identity politics related to SARA, bureaucratic regulations on Pilkada Candidates nominations, which resulted in "empty boxes," and the professionalism of Pilkada organizers. Therefore, the political policy for revising the electoral law should accommodate content that can overcome those problems to realize the elections democratically.

Keywords: local election; simultaneous local election 2020; election; political policy

Edmira Rivani (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) dan Eddo Rio (Fakultas Hukum Universitas Airlangga)

THE USE OF E-MONEY IN THE COVID-19 PANDEMIC TIME: LITERATURE REVIEW

Kajian Vol. 26, No. 1, Tahun 2021, pp. 75-89

Covid 19 is a new disease with a relatively fast transmission rate and a high mortality rate. This pandemic has changed people's behavior in non-cash transactions to reduce the risk of being infected with the coronavirus. This change is interesting to be studied so that the use of e-money in realizing a cashless society during the Covid-19 pandemic can be seen. The cashless society was socialized to the public before the covid-19 pandemic emerged. On August 14, 2014, the National Non-cash Movement (GNNT) was launched to increase public awareness and business people to use non-cash payments in financial transactions. The cashless society increased during this pandemic, marked by an increase in the value of e-money transactions reaching 59% during the January-July 2020 period. During the pandemic, changes in consumer behavior from physical shopping to online shopping caused online sales to increase. Of course, this impacts the use of transactions, which previously used cash; now, it is common to use e-money. The ease and security that exist in transactions using e-money can be an essential consideration for the public in choosing e-money as a means of payment. Several obstacles include non-cash transaction activities, one of which is social and cultural factors and the availability of infrastructure. In this case, the Government, business actors, and society must socialize the cashless society. By developing systems and regulations as an umbrella act for electronic money itself and providing supporting facilities that are evenly distributed throughout the region and not only focused on big cities.

Keywords: electronic transaction; e-money; cashless society; Covid-19.

Harris Y. P. Sibuea (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia)

EFFECTIVENESS OF REGULATION ON CONTROLLING NEGLECTED LAND

Kajian Vol. 26, No. 1, Tahun 2021, pp. 91-102

The existence of neglected land by landowners is still massive today. The land is a valuable treasure to have. The effectiveness of the law is very much needed in controlling neglected lands. The focus of the problem in this paper is how to regulate neglected land effectively. This article results from normative juridical research that analyzed using the theory of legal effectiveness. This paper found ineffectiveness in the legal factors and the implementing factors for controlling neglected land. The stages of identification and research are the most frequent stages of mistakes and are not even carried out by those authorized to control abandoned land. Therefore, all stages of control of neglected land-based on UUPA, PP No. 11 of 2010 and the Regulation of the Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia No. 4 of 2010 must be really implemented carefully so that no more neglected land.

Keywords: neglected land; legal effectiveness; controlling neglected land, controller of neglected land.